

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memperhatikan kecenderungan masa depan bangsa, maka peranan pendidikan menjadi semakin penting artinya, sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejarah membuktikan bahwa suatu bangsa yang mengandalkan kekayaan sumber daya alam saja, tanpa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sulit menjadi bangsa yang besar. Sebaliknya negara yang memiliki sumber alam terbatas, tetapi sumber daya manusianya berkualitas, dapat menjadi negara maju dan mandiri (Ginjar Kartasmita, 1996). *ENDANG DANIAL, 98; 1)*

Kecenderungan masa depan itu menuntut untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas, yakni yang memiliki kemampuan daya tembus dan daya tangkal yang kuat. Mereka yang berkemampuan IPTEK handal, bertaqwa, beretos kerja, memiliki daya juang serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang tinggi. Itulah tantangan utama agar masyarakat Indonesia bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang dan masa depannya. Mengingat dewasa ini arus globalisasi semakin terasa dalam konstalasi dunia internasional, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya mempengaruhi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia.

Arus globalisasi, industrialisasi, positif atau negatif, telah menembus batas-batas negara, bahkan menembus dinding-dinding rumah tangga keluarga. Jika tidak siap, maka arus globalisasi dan industrialisasi itu dapat mengancam dan membawa malapetaka (Ginjar Kartasmita : 1996). Tekanan global, kekuatan sosial ekonomi yang selalu berubah itu menekan perluasan sistem pendidikan, dan bahkan menimbulkan kerikuhan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Seperti konflik dalam sisi tujuan pendidikan, kerikuhan yang muncul apakah menekan pada kepribadian atau keterampilan ? (Coombs, 1968:4) menyebutkan kerikuhan atau ketegangan dalam sisten pendidikan itu merupakan krisis yang berakar pada tiga komponen utama yakni perubahan, adaptabilitas dan disparitas.

Krisis yang melanda pendidikan sekarang ini jika disimak secara seksama, lebih tepat disebut krisis lembaga pendidikan persekolahan yang sudah tidak mampu lagi

menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Hal ini menurut Reimer (1973) karena tidak satupun negara yang dapat memenuhi kebutuhan warganya akan pendidikan dalam bentuk sekolah saja (de Jong, 1984 : 104). Asumsi ini membuka peluang pendidikan yang lebih luas berupa pendidikan alternatif, yakni jalur pendidikan luar sekolah sebagai subsistem pendidikan. Jalur pendidikan luar sekolah inilah yang diharapkan dapat memainkan peranannya untuk saling melengkapi, mendukung, atau memperkuat, dengan jalur pendidikan persekolahan dalam satu pola hubungan yang kondusif.

Keberadaan jalur pendidikan luar sekolah dengan semua programnya semakin strategis kedudukannya apabila dikaji dari kecenderungan tujuan pembangunan yang pada hakekatnya bersifat majemuk. Tujuan pembangunan tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi menyangkut kesejahteraan sosial yang lebih luas. Pencapaian tujuan kesejahteraan sosial seperti upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, terciptanya pemerataan hasil pembangunan, perluasan kesempatan untuk memperoleh lapangan pekerjaan, meningkatkan emansipasi wanita, standar hidup, penghasilan yang layak, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Bilamana disimak pembangunan di Indonesia pada awal Pembangunan Jangka Panjang II yang berorientasi ke arah pembangunan sumber daya manusia, maka jalur pendidikan luar sekolah semakin strategis. Khususnya membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja, mendorong masyarakat belajar, sehingga mereka bisa beradaptasi dan berperan serta dalam program pembangunan di lingkungannya. Pada gilirannya pendidikan ini dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan, dan manusia ditempatkan pada posisinya sebagai subjek dan objek pembangunan. Kondisi jalur pendidikan luar sekolah sudah barang tentu tidak dengan sendirinya tumbuh dan berkembang, atau secara serta merta disambut kehadirannya sebagai katup pengaman, ataupun jalan pintas untuk memecahkan masalah sosial.

Hal ini disebabkan selain konsep-konsep dasarnya perlu dikaji terus, juga programnya sebagai realisasi konkrit dari konsep dasar itu perlu disempurnakan dengan memanfaatkan fakta empirik yang digali dari proses implementasinya. Sebagai

lembaga pembelajaran dan pemberdayaan, program ini bisa dikaji dari pengalaman atau melalui analisis kritis terhadap persoalan-persoalan yang muncul di lapangan.

Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar membelajarkan yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan (UU. SPN. NO. II/1989, pasal 10 ayat 3). Karakteristik inilah yang dimiliki jalur pendidikan luar sekolah, bahkan bisa dianggap sebagai pendidikan alternatif. Maksudnya sebagai wahana pembelajaran bagi warga masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan persekolahan.

Indikator utama pembelajaran dan pemberdayaan yang dikembangkan cukup menonjol dari program pendidikan luar sekolah adalah : (1) jangkauan program yang semakin luas untuk meraih peran serta kelompok sasaran yang benar-benar memerlukan; (2) manfaat hasil pembelajaran dari program itu semakin banyak dinikmati oleh mayoritas kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan; (3) intensitas peran serta masyarakat dalam program itu tidak semata-mata instruksi dari atas, namun lebih didasarkan pada partisipasi otonom; (4) kebutuhan belajar bangkit dari kelompok masyarakat itu sendiri, dan tidak lagi semata-mata diintroduksi dari luar; (5) pengelolaan dan penerahan sumber daya pendukung material, finansial dan sumber belajar bagi pelaksanaan kegiatan belajar semakin mampu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atas dasar kepercayaan diri dan sikap mandiri; (6) efisiensi internal program yang tinggi, yakni tercapainya tujuan maksimal dengan pemakaian sumber daya sehemat mungkin; (7) efisiensi eksternal program semakin tinggi, yakni program itu bukan saja dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang lebih mendalam, pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Karakteristik itu berkembang secara evolusioner, sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia yang terus berubah. Esensi program jalur pendidikan luar sekolah yang diharapkan tidak sekedar menyentuh kebutuhan masyarakat, tetapi program itu harus mampu membangkitkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang benar-benar dirasakan, sampai kemudian menghasilkan suatu akibat yang positif. Perolehan hasil belajar yang positif diartikan sebagai suatu perubahan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan, yaitu warga belajar lebih mampu memahami

masalah yang dihadapi dan mahir dalam memecahkan masalahnya secara realistik. Bahkan Warga belajar bisa tersingkir dari budaya diam, masa bodoh (Sudjana, 1983:166) dan lepas dari rasa tertekan dan fatalis (Freire, 1975). Mereka ini boleh jadi mampu beradaptasi dan berdimensi aktif, mengindra suasana dan mengendalikan lingkungan fisik dan sosial guna menguasai hari depan yang lebih baik.

// Bilamana mencoba menelaah dampak program pendidikan luar sekolah, maka program itu perlu dipahami sebagai salah satu komponen dari kerangka sosial yang lebih luas. Program yang diluncurkan ke masyarakat itu perlu dikaji sebagai salah satu faktor yang tidak independen, malahan bisa dianggap sebagai salah satu subsektor dari program pembangunan, baik dari tingkat nasional maupun tingkat lokal di pedesaan. Hal ini akan tampak bisa dipahami, sebab setiap program yang dikembangkan senantiasa berkaitan dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk menciptakan perubahan sosial dan budaya.

Potensi sosial yang dijadikan wahana pengembangan program pendidikan luar sekolah adalah organisasi sosial atau lembaga sosial, yang berupa tatanan sosial atau sebagai satuan sosial di masyarakat (Lowie, 1963:3). Persoalannya mungkin saja program pendidikan luar sekolah yang merupakan 'intervensi' dengan sengaja dalam rangka pembangunan sosial tidak mampu menimbulkan perubahan secara substansial. Itulah sebabnya perlu pengkajian secara mendalam tentang wadah kegiatan program itu sebagai organ dan perilaku interaksi individu dalam program tersebut (Wekly dan Yuki , 1992). Demikian juga penelaahan secara mendalam akan memadai bilamana kajian itu meliputi faktor internal dan eksternal secara organisatoris dari program pendidikan luar sekolah itu.

// Keyakinan itu didasarkan pada asumsi bahwa organisasi sosial, dianggap sebagai satuan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang secara historis telah memberikan kontribusinya terhadap pergerakan nasional (Santoso S. Hamijoyo , 1982) dan perubahan sosial (Judistira K. Garna, 1993). Persoalannya menjadi lebih rumit sebab program pembangunan yang diluncurkan ke pedesaan tidak memberikan pengaruh atau memperlancar dan memperkuat, melainkan malah berkesan saling bersaing.

Proses pembelajaran serta pemberdayaan suatu kelompok masyarakat, bukan hanya transformasi sosial, tetapi proses budaya. Perubahan pola

kehidupan yang terjadi akibat program pembangunan ekonomi dari sektor pertanian ke industri mengandung spektrum informasi yang amat kompleks. Hal ini bisa menimbulkan disonansi kognitif, respon sikap yang menolak, atau keraguan terhadap hal yang dianggap baru (Cohen, 1976; Roger, 1983). Taktik pengembangan program yang diembal dalam misi pendidikan luar sekolah lazimnya mengangkat nilai-nilai, dan kelembagaan budaya yang sudah mengakar dari kehidupan masyarakatnya sebagai potensi atau basis pengembangan.

Dasar persepsi masyarakat terhadap pembaharuan, modernisasi yang melanda masyarakat, seringkali berakar dari nilai-nilai religi, tradisi, kebersamaan, ekonomi, politik, keamanan, dan kemampuan. Informasi yang datang, diukur dari derajat dan ciri-ciri umum serta keunikan setiap program, misalnya : manfaat, hasil, keuntungan yang ada di dalamnya, berat ringannya resiko apabila informasi atau ajakan itu diikuti, diterima, diyakini, dan diterapkan. Selain itu termasuk juga peluang dan kesempatan yang realistik untuk memecahkan masalah bagi kebutuhan dasar pengembangan usaha kesejahteraan hidup masyarakat.

Di arena berbagai sumber kekuatan nilai, potensi, dan kekuatan program yang dikembangkan untuk perubahan sosial, isu kritis yang tampil adalah apa dan bagaimana organisasi sosial itu berperan sebagai wahana pembelajaran dan pemberdayaan ? Karakteristik organisasi sosial yang bagaimanakah yang dianggap sebagai satuan pendidikan luar sekolah, yang berperan membantu membina transformasi masyarakat dari kondisi agraris ke kondisi industri.

Isu-isu itu berkembang karena adanya muatan berbagai kepentingan sosiologis, politis, dan ekonomi; yang bernuansa pada sisi psikologis masyarakat. Satu sisi bervisi memihak kepentingan masyarakat lokal, nasional dan global, di sisi lain intervensi program pemerintah yang mesti diintrodusir bagi kepentingan pemerataan, pertumbuhan dan kestabilan. Akibatnya timbul semacam kekhawatiran yakni menciptakan perubahan sosial, namun kekuatan organisasi sosial itu tidak memadai untuk menggerakkan perubahan di lingkungan sekitar. Lemahnya dampak yang diharapkan, bukan saja tertumpuk pada masalah yang berakar dari faktor-faktor, ciri-ciri individu atau kelompok khalayak penerima, isi program, perencanaan dan program pengorganisasian, mobilitas dan alokasi

sumber daya, dan efektifitas dari implementasi program, yang mencakup dukungan kemampuan administratif yang memadai, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi atau berkembangnya infrastruktur fisik dalam bidang transportasi dan media komunikasi. Perkembangan infrastruktur ekonomi dan sosial seperti lembaga kesehatan dan kependudukan, pasar, koperasi, perbankan, lembaga profesi, kesenian, bahkan ciri-ciri budaya berkelompok yang secara struktural memberikan pola tersendiri bagi tingkah laku baru dari hasil belajar yang dapat direalisasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Untuk memecahkan masalah pokok tentang organisasi sosial sebagai satuan pendidikan luar sekolah di masyarakat, perlu dipertegas dengan paradigma pendekatan. Demikian juga ada konsep kunci yang selalu relevan kaitannya dengan program pendidikan luar sekolah, seperti pembangunan, modernisasi dan perubahan sosial.

1. Konsep Pembangunan

Asumsi utama yang menjadi keyakinan bahwa untuk memahami dampak program pendidikan luar sekolah, pendidikan bukan faktor yang berdiri sendiri. Antara pendidikan dan pembangunan masyarakat selalu ada kaitan secara dialektik pendidikan merupakan produk masyarakat, dan dalam beberapa hal pendidikan menimbulkan perubahan tertentu pada masyarakat (Malassis, 1976).

Demikian juga studi ini tidak menganut pandangan idealisme yang beranggapan bahwa pendidikan terisolasi untuk dirinya sendiri, bahkan tidak berpandangan determinisme mekanistik yang memahami corak dan masa depan pendidikan itu secara langsung dipengaruhi oleh masyarakat di sekitarnya, dan sedikit banyak pendidikan diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya (Faure, dkk., 1981:81).

Itulah sebabnya studi ini mengambil posisi menelaah perubahan sosial melalui pendekatan pendidikan berwawasan lingkungan, yakni faktor manusia dengan perubahan dalam dimensi perilakunya merupakan masalah sentral. Ini artinya bahwa pendekatan yang menitikberatkan pengembangan pengetahuan, pendalaman keyakinan, perubahan sikap, pembangkitkan semangat, keterampilan dan partisipasi manusia. Kesemuanya dapat dibina menjadi suatu energi dalam pengembangan sumber daya manusia yang memiliki

kedudukan strategis dalam pembangunan, karena itu pemerataan pendidikan atau akses informasi memiliki porsi yang amat penting untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat.

Konsep pembangunan yang banyak dianut oleh suatu masyarakat mencerminkan ide pemecahan krisis aktual, dan sekaligus suatu proyeksi tujuan masa depan yang ingin dicapai. Coombs dan Ahmed (1984) mengungkapkan tiga macam krisis yang melanda negara berkembang yaitu : (1) ledakan penduduk; (2) penyediaan tanah; dan (3) penyediaan lapangan kerja. Ungkapan yang lain dari Kereet (1977) mengenai masalah umum yang dihadapi manusia dewasa ini adalah penambahan penduduk, kemiskinan, buta huruf, dan keterlantaran pendidikan yang dialami oleh anak-anak usia sekolah (Napitupulu, 1980).

Krisis yang ada itu berakar dari terjadinya perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan dari pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumber energi, yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk, pengrusakan lingkungan, ketidakadilan, hak azasi dan yang lainnya. Akibatnya menggugat keabsahan lembaga yang ada di masyarakat termasuk lembaga pendidikan.

Pembahasan masalah krisis, pertumbuhan penduduk dan krisis lingkungan pada dasarnya tidak sekedar memaparkan apa karakteristik pertumbuhan itu, berapa porsi, tetapi juga membahas mengapa hal ini terjadi dan bagaimanakah pemecahannya. Krisis kemiskinan kultural dan struktural yang diangkat Sayogyo (1975) dan Emil Salim (1980) ditandai dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi. Demikian pula ciri kualitas yang dimiliki penduduk miskin itu seperti tidak bermutu dalam hal tenaga kerja, rendahnya modal usaha, luas tanah yang kurang memadai, keterampilan yang rendah, kondisi fisik yang lemah serta lingkungan hidup yang kurang mendukung (Emil Salim, 1980).

Kemiskinan kultural dan struktural bertalian dengan berbagai penyebabnya, diantaranya ada asumsi bahwa kemiskinan kultural terjadi karena keterbelakangan dalam pengetahuan, informasi, sikap atau sistem nilai tertentu yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pendidikan luar sekolah sering dikemukakan sebagai akibat kemiskinan pendidikan atau informasi. Kemiskinan struktural

adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu, mereka tidak dapat menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Soemardjan, 1984). Pandangan kedua ini merupakan anti tesis pandangan pertama tadi, melalui difusi teknologi dan pengetahuan, seolah-olah tak terelakkan akan terjadi peralihan dari ciri masyarakat tradisi ke masyarakat modern.

Ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi seperti itu adalah akibat strategi pembangunan ekonomi yang dualistik (Boeke, 1949). Ketimpangan antara pertanian, dan industri, kota dan desa, yang nampak kecenderungan teori itu terus membekas. Kecenderungan strategi pembangunan di pedesaan yang masyarakatnya mayoritas petani, dengan asumsi bahwa kualitas hidup mereka yang kebanyakan memiliki ciri-ciri tradisional itu akan meningkat apabila warga masyarakatnya mengalami peningkatan pendapatan. Mereka memiliki kekuatan dan peluang yang besar untuk berperan serta dalam kelembagaan masyarakat yang ada. Hambatan yang sering menimbulkan ketimpangan sosial diantara mereka atau juga dengan kota, adalah karena pada kelompok masyarakat itu dianggap kolot, terbelakang, mistik, dan tidak bisa menyesuaikan dengan inovasi yang diperlukan.

Pandangan ini akan memperlemah dan mempersulit pengembangan program pendidikan luar sekolah, yang dianggapnya menimbulkan perubahan yang mekanistik, yang melupakan hambatan itu, yang justru peluncuran program pendidikan luar sekolah tidak akan memadai jika hanya mengandalkan hasil akhir saja. Perlu juga dipelajari dari proses yang berkaitan dengan berbagai faktor yang ada di pedesaan sebagai sebuah sistem sosial. Makin mampu memahami faktor yang determinan dalam masyarakat di sekitar program, maka makin besar kemungkinan faktor itu bisa dikontrol secara mendalam untuk mendukung peningkatan keberhasilan program hingga maksimal.

Rekayasa pengelolaan dan pengorganisasian pendidikan luar sekolah dengan memanfaatkan organisasi sosial, bisa dimanfaatkan secara optimal, dengan asumsi bahwa wahana itu mampu menampung dan mengembangkan aspirasi mereka dari berbagai aspek kehidupan. Sekaligus wahana ini dianggap memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan pedesaan. Ada dua kemungkinan paradigma yang bisa dipakai. Pertama pada masyarakat dalam rangka menyebarluaskan informasi pembangunan guna partisipasi

mereka. Implikasinya adalah pada perencanaan, yaitu program pendidikan luar sekolah tidak berdiri sendiri, dan dirancang untuk mendukung sektor lainnya. Kedua program pendidikan luar sekolah merupakan sektor yang berdiri sendiri dalam perencanaan umum dalam rangka pembangunan pedesaan. Menurut paradigma kedua tersebut, program pendidikan luar sekolah dipandang sebagai kegiatan pembelajaran yang dapat secara langsung mempengaruhi tercapainya pembangunan di pedesaan.

Dalam studi ini program pendidikan luar sekolah yang ada dalam organisasi sosial dipahami sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri. Pembahasan apapun bentuk programnya, implikasi kegiatannya akan mampu untuk langsung mencapai modernisasi, karena untuk itu diperlukan kondisi tertentu agar dampak program dapat semakin meluas dan mendalam.

Munculnya isu pembangunan pedesaan dapat ditilik dari berbagai argumentasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Data menunjukkan 69,07 persen penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dan sisanya 30,93 persen tinggal di perkotaan (BPS, 1990). Menurut proyeksi kependudukan tahun 2000 yang akan datang diperkirakan jumlah penduduk di pedesaan akan tetap banyak. Maka orientasi pembangunan di Indonesia kedudukan pembangunan pedesaan menempati kedudukan yang penting.

Kebijakan dalam Pelita keenam sektor Pembangunan daerah diantaranya adalah peningkatan peran serta masyarakat dan kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah, peningkatan perkembangan desa swadaya dan desa swakarsa menuju perkotaan yang efisien, dan penciptaan lingkungan yang sehat, rapih, aman dan nyaman, melanjutkan penataan penguasaan dan penggunaan tanah, penataan kembali batas wilayah dan daerah. (GBHN, 1993)

Jelaslah bahwa tuntutan pembangunan diarahkan kepada keterlibatan masyarakat pedesaan, melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian juga orientasi pada perkotaan, yang saat ini kota-kota besar perkembangannya begitu cepat yang merembet ke desa-desa sekitarnya.

Arah pembangunan tersebut menuntut pengembangan program pendidikan luar sekolah dalam kebulatan yang utuh. Pembinaan sumber daya manusia menuju ke arah

kemampuan memanfaatkan sumber daya alam, yang dikemas dalam upaya produksi pada suatu lembaga sosial yang ada, sehingga upaya pendidikan semakin nyata kontribusinya terhadap pemecahan masalah masyarakat, khususnya masalah di pedesaan.

Tentu saja tidak berarti masalah di perkotaan diabaikan, sehingga program pendidikan luar sekolah tidak perlu diarahkan ke sana. Dalam kenyataannya, lingkungan perkotaan memiliki dimensi dan keunikan tersendiri, permasalahannya dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial, kultural, urbanisasi dan sebagainya. Demikian juga warga masyarakat yang berada dalam lingkaran antara desa dan kota, dengan isu yang lebih menarik, dan dianggap masyarakat transisi atau marginal.

Teori marginalitas dilahirkan atas ide teori ketergantungan atau dependensi, yang mendeskripsikan tentang kemiskinan sebagai akibat ketergantungan. Sebenarnya yang dimaksud dengan marginal adalah suatu proses bila sebagian besar dari penduduk suatu negara tidak berpartisipasi dalam aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan politik di negara itu (O'Sullivan, 1981; Mc Anany, 1981). Konsep marginalitas ini dipergunakan oleh Germani (1973) untuk menggambarkan situasi kehidupan di daerah 'Slum'. Untuk itulah dikembangkan program pendidikan dan jasa sosial agar bisa membangkitkan semangat produktif. Menurut Germani (1973) konsep marginalitas berakar dari hal utama, yaitu (1) perluasan hak-hak manusia sesuai dengan prinsip persamaan dan kebebasan, serta kesadaran; (2) proses kontak budaya; (3) peningkatan modernisasi dan perluasannya.

Melihat karakteristik marginal, identik dengan masyarakat pinggiran, mereka yang tersisih ekonominya sehingga termasuk kelompok miskin, pekerjaannya sederhana, tidak memiliki posisi penting (Mohamad Sobary, 1995). Secara psikologis mereka merasa terdesak, merasa kurang diperlakukan adil, akibat pembangunan. Pembangunan menurut mereka meminggirkan, memiskinkan dan menterlantarkan masyarakat 'kecil' yang tidak berdaya.

Pendekatan program pembinaan masyarakat, ditujukan untuk membantu dan mendampingi mereka pada posisi yang sebenarnya tentang hak dan kewajibannya. Pendekatan dalam hal pekerjaan, terutama pekerjaan anak, dilakukan dengan pendekatan penghapusan (abolition), perlindungan (protection) dan pemberdayaan (empowerment) (Bequele & Boyden, 1988; Myers, 1994). Pendekatan terhadap penghapusan pekerjaan

anak dilandasi asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Pendekatan kedua berpandangan bahwa anak adalah individu yang mempunyai hak untuk bekerja, karena itu hak bekerja harus dijamin dengan peraturan sebagaimana peraturan orang dewasa, agar dia terhindar dari tidak penyalahgunaan dan eksploitasi.

Pendekatan yang paling sulit dilakukan adalah pendekatan penghapusan tenaga anak, walaupun banyak negara termasuk Indonesia berusaha melaksanakannya, tetapi kebijakan ini kontradiktif dan tidak realistik (White ; 1994). Maka pendekatan yang lebih realistik dari sudut pekerja anak adalah mengkombinasikan pendekatan kedua dan ketiga yaitu pengakuan hak mereka sebagai pekerja dan perlindungan kerja. Upaya ini memberikan perspektif lain bagi para pekerja, seperti yang diungkapkan oleh Fyfe (1989) memanusiaawikan pekerjaan anak-anak dengan menggabungkan secara kreatif pekerjaan mereka dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

2. Peran Organisasi Sosial dalam Perubahan Sosial

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil, yang lebih baik yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial hakekatnya memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga diperlukan bantuan orang lain, agar eksistensi ke-manusia-annya lebih baik, makin berkembang dan kompleksnya kehidupan manusia, makin banyak tumbuh diferensiasi dan spesialisasi usaha, kerja, kelompok dan kepentingan.

Persoalan pembangunan ekonomi yang melanda negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, mengalami perubahan dalam proses kehidupan yang banyak melibatkan lembaga sosial di dalamnya. Smelser (1977) mengungkapkan ada empat proses yang terjadi dalam perubahan itu, yaitu dalam bidang (1) teknologi, terjadi perubahan dari teknik yang sederhana dan tradisional ke arah penggunaan pengetahuan ilmiah; (2) bidang pertanian yang sederhana ke arah produksi hasil pertanian untuk pemasaran; (3) dalam bidang industri terjadi peralihan dari penggunaan tenaga manusia dan binatang ke industri yang sebenarnya; dan (4) bidang ekologi perkembangan masyarakat bergerak dari sawah dan desa ke pemusatan di kota.

Keempat proses perubahan itu bisa terjadi secara serempak, walaupun berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda di setiap negara. Perubahan politik dari sistem kewibawaan suku dan desa ke arah sistem pemilihan umum, kepartaian, perwakilan dan birokrasi. Pergeseran nilai religi dari sistem agama, ke arah kepercayaan yang sekuler. Demikian juga perubahan keakraban dalam hubungan keluarga menjadi renggang (Weiner, 1977).

Strategi pendidikan dalam proses transformasi sosial seperti itu menurut Magendzo (1990) lebih tepat dianggap pendidikan untuk mobilitas sosial, mengacu pada partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dasar pemikiran Magendzo adalah bahwa mobilitas sosial ini merupakan upaya meningkatkan derajat kelompok masyarakat miskin ke arah tahap kehidupan yang lebih baik, seperti meningkatkan kemampuan warga negara agar bisa memainkan peranan yang menentukan dalam pembangunan masyarakat demokratis.

Program pendidikan dalam konteks mobilitas sosial ini menurut pendapat Bengoa (1988) lebih tepat melibatkan organisasi non pemerintah (NGO). Alasannya agar bisa dengan leluasa program itu dilaksanakan di luar bidang kegiatan pemerintah dan di luar batas-batas praktek politik yang mapan. Tujuan program pendidikan ini yakni pembangunan kembali struktur sosial, dengan menyusun kaitan-kaitan antara individu, kelompok, serta organisasi yang berbasis masyarakat untuk mengatasi sosial dan kurangnya keterpaduan (Bengoa, 1988).

Arti demokrasi pada dasarnya adalah suatu konsep politik, tetapi dipergunakan juga dalam pengertian filosofis untuk menunjukkan sesuatu inherent pada pengertian persamaan, kebebasan untuk mendapatkan manfaat, dan hak-hak asasi manusia (Theodorson, 1969). Proses demokratisasi bila digunakan dalam skala yang lebih luas, seperti dalam kaitan pembentukan kebudayaan nasional, yang menurut Dahl (1985) lembaga-lembaga masyarakat yang otonom pasti terwujud. Artinya otonomi yang dinikmati itu disamping merupakan konsekuensi langsung dari proses demokratisasi juga merupakan bukti penting dari berfungsinya proses demokratisasi itu sendiri.

Dengan demikian proses demokratisasi itu akan mengembangkan perangkat sistem nilai budaya dan norma sosial dan melembagakannya dalam berbagai lapangan kehidupan yang baru, untuk mendukung alih ilmu dan teknologi modern (Ushman Pelly, 1991).

Selanjutnya menurut Pelly demokratisasi sebagai sistem : memberikan kebebasan kepada manusianya untuk memilih nilai yang menjadi motivasi, pendorong, pembentuk sikap dan sekaligus tujuan dari tindakannya. Oleh karena nilai itu terkait dengan unsur adaptasi budaya, maka dalam mengadopsi suatu unsur budaya, orang tidak akan dapat melepaskan nilai-nilai yang melekat pada unsur budaya itu, seperti pada unsur budaya teknologi modern, nilai rasionalitas, ketelitian, ketekunan, disiplin, dan efisiensi harus turut serta diambil alih.

Dapat dipahami bahwa alih ilmu dan teknologi bukan suatu masalah teknis, melainkan suatu proses enkulturalisasi (pembudayaan) atau proses pendidikan yang memerlukan waktu yang secara selektif mencangkok nilai budaya baru ke dalam budaya masyarakat. Proses pembudayaan dalam arti menyempurnakan kelembagaan sosial yang tangguh mampu menghadapi perubahan dan mengatasi lingkungan interaksi sosial.

Secara organisatoris alih teknologi dan ilmu itu bisa mengaktualisasikan aspirasi yang berkembang, seperti kelembagaan ekonomi yang mampu merangsang persaingan, disiplin, peningkatan produktivitas kerja, orientasi pasar, penguasaan peralatan dan teknologi yang memadai. Hal ini bisa mengembangkan sosial budaya, melintasi lingkungan geografi sehingga membina wawasan yang lebih luas.

Strategi pendidikan semacam ini, mengimplikasikan dari konsep pendidikan untuk semua (education for all). Pendidikan luar sekolah membawakan misi penawar, dan terapi yang berakar dengan tuntutan dan harapan masyarakat, sekaligus sebagai pendorong untuk menemukan jati dirinya, menemukan masalah dan memperoleh alternatif pemecahan masalahnya. Umumnya pendekatan pendidikan luar sekolah model ini mengutamakan dialog, belajar dalam kelompok, penilaian sebagai dasar untuk pelajaran dan pengetahuan lebih lanjut.

Dengan demikian organisasi akan berperan membantu menemukan akar budaya, tradisi yang dipersepsikan warga masyarakat yang dapat diberdayakan untuk dijadikan basis pembelajaran mereka. Dasar pembelajaran dan pemberdayaan yang dimaksud bisa beranjak dari pandangan hidup, sikap hidup, dan pengembangan wawasan, baik individu atau kelompok yang akan bisa mengembangkan program pendidikan yang relevan. Dalam program itu ditemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah dengan pendekatan yang

cocok dengan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Misalnya budaya petani yang tradisional, selama ini menjadi sasaran dan pendekatan utama untuk pembangunan.

Dilihat komposisi penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, kondisi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 1971 sebesar 64,2 persen, menurun menjadi 49,9 persen pada tahun 1990, walaupun demikian hasil produksi pertanian terus meningkat sejak pelita kesatu, sampai tahun 1984 dicapai swasembada pangan. Pada tahun 1984 produksi padi di Indonesia mencapai 38.136 ribu ton sedangkan pada tahun 1993 meningkat menjadi 48.181 ribu ton. Keberhasilan ini telah mengubah posisi Indonesia dari pengimport beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an menjadi negara yang berswasembada beras hingga sekarang (Bapenas, 1994).

Perkembangan sektor industri selama PJP I berkembang pesat, baik dari segi jumlah produknya, maupun dari segi keanekaragaman produknya, sehingga telah dapat menghasilkan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Bukan hanya industri yang menghasilkan sandang pangan dan bahan bangunan, tetapi juga sarana dan peralatan untuk keperluan peningkatan produksi dan hasil pertanian. Lebih jauh lagi pada Repelita yang terakhir industri lebih berkembang, sehingga mampu meningkatkan barang-barang modal yang canggih serta rancang bangun dan perekayasaan. Sudah barang tentu peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri makin meningkat, pada tahun 1971 sebesar 6,5 %, naik menjadi 11,4 % pada tahun 1990 (Bapenas, 1993).

Umumnya sentra industri itu berada dalam suatu kawasan tertentu, di pinggir kota-kota besar. Hal ini mengundang mobilitas penduduk dari desa ke kota, atau dari daerah lainnya. Perpindahan penduduk ini membawa akibat terjadinya perbauran masyarakat dalam suatu lingkungan itu. Mereka yang datang dengan membawa berbagai nilai tradisi, sosial budaya, ekonomi dan politik tertentu bercampur baur dengan kelompok masyarakat setempat yang berbeda latar belakang sosial budayanya.

Tuntutan penyesuaian antara masyarakat pendatang, dengan penduduk setempat, kelompok pendatang dengan para pendatang yang berasal dari kelompok masyarakat yang berbeda, mendesak mereka agar berusaha beradaptasi agar mengurangi beberapa perbedaan itu. Penduduk setempat juga dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru, yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Salah satu upaya mereka

dalam menjembatani kondisi yang baru itu adalah dengan cara banyak bergaul dan berinteraksi dalam suatu organisasi sosial sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, dengan asumsi bahwa organisasi sosial itu akan bisa mempercepat proses adaptasi mereka dengan lingkungan yang baru itu.

Dalam mempelajari indikasi interaksi dalam organisasi sosial itu nampaknya faktor internal inilah yang menjadi fokus studi ini. Adakah dampak keberadaan organisasi sosial itu terhadap masyarakat, untuk membantu adaptasi mereka dalam kondisi industri itu? Manfaat dan hasil pengalaman apa saja yang diperoleh dari keterlibatan mereka dalam organisasi sosial itu? Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1995) mempelajari perilaku manusia dalam suatu organisasi dan sebaliknya, yaitu pengaruh organisasi terhadap anggota, memerlukan ilmu yang interdisipliner. Pengetahuan perilaku yang terutama dikaji dalam studi psikologi, sosiologi dan antropologi budaya telah memberikan kerangka dasar dan prinsip pada bidang perilaku organisasi, walaupun masing-masing disiplin ilmu itu mempunyai fokus yang sedikit berbeda (Gibson dkk, 1995). Selanjutnya Gibson menyarankan multi disiplin ilmu itu bisa menggambarkan sejumlah hal yakni; cara berpikir, persepsi, kapasitas pembelajaran, perasaan dan sasaran tujuan yang diharapkan. Disamping orientasi kemanusiaan, juga kinerja pembinaan, pelatihan, diasumsikan dapat memperkuat dan meningkatkan perilaku mereka dalam organisasi.

3. Organisasi Sosial sebagai Satuan Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan (UU. No.2 tahun 1989; pasal 10 ayat 3). Dalam pelaksanaannya jalur pendidikan ini dilakukan dalam satuan-satuan pendidikan luar sekolah yang meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan yang sejenis (UU No. 2 tahun 1989; pasal 9 ayat 3).

Satuan pendidikan yang sejenis meliputi bentuk Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan satuan pendidikan luar sekolah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. Satuan pendidikan

lainnya seperti padepokan pencak silat, sanggar kesenian, panti atau balai latihan, dan bengkel teater. (Penjelasan PP Nomor 73 tahun 1991 pasal 19).

Ketentuan satuan pendidikan luar sekolah seperti itu dapat merupakan formulasi yuridis formal, sebagai implikasi kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap eksistensi pendidikan luar sekolah. Kendati bagaimana pun pemerintah tetap berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam berbagai jalur, jenis, satuan, serta jenjang pendidikan itu.

Secara konseptual pendidikan luar sekolah kondisinya telah berkembang cukup lama, sejalan dengan keberadaan manusia di dunia ini. Konsep pendidikan luar sekolah hadir di tengah-tengah masyarakat jauh sebelum masyarakat mengenal lembaga pendidikan sekolah (Sutaryat Trisnamansyah, 1993). Keberadaannya seiring dengan proses pembudayaan, sosialisasi, pembinaan dan latihan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia lewat lembaga, organisasi dan kelompok yang berakar dari nilai pandangan hidup masyarakat.

Proses pewarisan nilai dasar kepribadian berlangsung dalam keluarga (Sikun Pribadi, 1981) proses pemagangan (D. Sudjana, 1983) Kaderisasi pemuda dalam berbagai gerakan kepeloporan dan kemerdekaan (Santoso S. Hamijoyo, 1956), sampai pada pengembangan keterampilan kerja (Simkins, 1977) hobi serta profesi dalam rangka pengembangan IPTEK. Itulah sebabnya pendidikan ini termasuk dalam lembaga sosial atau menurut Lowie (1956) social institution. Istilah lain dari institusi sosial ini adalah pranata sosial (Sudardja Adiwikarta 1988: 37) yang berkenaan dengan sistem peran dan norma sosial yang saling bertalian dan terorganisir di sekitar pemenuhan kebutuhan dan fungsi sosial yang penting.

Ini berarti pendidikan sebagai salah satu subsistem sosial yang ada dalam masyarakat, yang berkaitan dengan subsistem lainnya, seperti ekonomi, politik, agama, untuk mencapai tujuan masyarakat itu. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu sistem organisasi yang terdiri atas sejumlah subsistem yang saling mempengaruhi dan saling bergantung (Sudardja Adiwikarta, 1988: 16). Pandangan sistem dalam masyarakat yang terkenal pengaruhnya adalah Talcott Parsons. Menurut pandangannya sistem sosial

itu harus memenuhi empat persyaratan fungsional, yaitu adaptation, goal attainment, integration dan laten pattern maintenance, disingkat AGIL (Sudardja Adiwikarta, 1988 : 17) yang berarti bahwa; (A) Adaptasi yang berarti mempunyai fungsi penyesuaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, yang mampu dipenuhi oleh subsistem ekonomi masyarakat. (G) Goal, atau pencapaian tujuan, dalam arti fungsi pencapaian tujuan masyarakat yang dapat dilakukan oleh subsistem pemerintahan. (I) Integrasi yakni subsistem yang mengusahakan terciptanya kesatuan dan persatuan dalam masyarakat dapat dilakukan oleh subsistem hukum dan pengawasan. (L) Laten pattern maintenance, artinya terciptanya suatu masyarakat dengan cara nilai kehidupan yang telah ada dan terus dipertahankan, diwariskan, dikembangkan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya. Tugas subsistem keluarga, agama, dan pendidikan yang berfungsi mengemban tugas itu. Keempat subsistem yang dilontarkan oleh Parsons itu saling berkaitan secara fungsional untuk mencapai tujuan masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks dalam suatu sistem sosial yang luas.

Kebijakan pengembangan program pendidikan luar sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, dan komponen dari subsistem yang ada dalam masyarakat, oleh karena itu menetapkan tujuan dan pendekatan pendidikannya tidak bisa lepas dari subsistem yang ada dalam masyarakat itu. Strategi pendidikan luar sekolah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (subsistem ekonomi). Selalu berusaha sejalan dan bermuara pada tujuan masyarakat yang telah dipandu oleh para pemimpinnya (subsistem pemerintah) dan telah dicanangkan pada berbagai program pembangunan. Program pendidikan luar sekolah mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, demokratisasi pada masyarakat (subsistem hukum dan pengawasan) yang memang merupakan salah satu karakternya. Pendekatan dan pengembangan program pendidikan luar sekolah layaknya sebagai organisasi sosial yang dapat mempertahankan nilai-nilai budaya, mewariskan, menumbuhkembangkan nilai kemapanan dengan pola yang ada dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya sangat strategis jika program pendidikan berkaitan dengan lembaga sosial yang ada (subsistem keluarga, agama dan pendidikan).

Bisa jadi pendidikan sebagai lembaga sosial akan teraplikasikan pada berbagai interaksi individu dalam macam-macam kelompok; kelompok keluarga, kelompok agama,

kelompok pemuda, kelompok seni budaya dan kelompok usaha yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sekaligus kelompok-kelompok ini bisa dijadikan wahana bagi mereka memaknakan fungsi adaptasi, mencapai tujuan kehidupan, menjadi warga negara yang baik, dan sebagai penurunan nilai budaya seperti disyaratkan 'AGIL' tersebut.

Sejarah telah menunjukkan peran organisasi sosial sebagai lembaga pendidikan luar sekolah yang handal dan sangat berarti bagi perkembangan masyarakat dan bangsanya sejak dahulu. Organisasi sosial yang dimaksud adalah yang paling dekat dengan lingkungan kehidupan mereka seperti; kelompok pengajian anak-anak, kelompok remaja masjid, organisasi kepemudaan, kelompok usaha, kelompok mata pencaharian, kelompok pekerja, organisasi politik, keagamaan, kelompok seni budaya, profesi dan kesenangan/hobi. Hal ini dianggap amat strategis sebagai wahana pembelajaran dan pemberdayaan bagi warga masyarakat sekitar.

Melalui organisasi sosial tersebut warga masyarakat terlibat dalam proses sosialisasi sehingga memungkinkan berkembangnya rasa tanggung jawab dan kecakapan-kecakapan yang semuanya diperlukan dalam melaksanakan peran sosial (Sudardja Adiwikarta, 1988 : 17). Jadi merupakan proses adaptasi atau penyesuaian seseorang ke dalam masyarakat atau kehidupan kelompok tempat ia hidup dan bergaul. Tidak heran manakala ada orang yang tidak berhasil dalam proses itu disebut menyimpang (social deviant) dari norma yang ada dan akan ditolak serta pantas menerima hukuman dari komunitasnya.

Itulah sebabnya proses sosialisasi berlangsung seumur hidup, agar tidak menyimpang. Manusia senantiasa berusaha terus meningkatkan kemampuan dan wawasan untuk memanfaatkan serta menciptakan keseimbangan dengan lingkungannya. Konsep sosialisasi sulit dibedakan dengan konsep pendidikan yang terjadi pada setiap orang, dalam konsep pendidikan ada kompetensi psikologis seperti daya nalar dan rasionalitas (Sudardja Adiwikarta, 1988 : 37).

Oleh karena itu konsep pendidikan seumur hidup, digunakan sebagai konsep dasar dalam membelajarkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seperti gagasan Komisi Internasional untuk Pengembangan Pendidikan (ICED) pada Badan UNESCO untuk negara-negara sedang berkembang dalam mengembangkan demokratisasi

sebagai dasar meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Menurut komisi ini kunci pengembangan demokrasi itu adalah pendidikan untuk semua orang. Dengan pendidikan yang menyeluruh, dan berlangsung seumur hidup, masyarakat dapat menghasilkan manusia yang lengkap. Kesan setiap orang tidak lagi mencari pengetahuan itu sekali saja, untuk bekal selama-lamanya, tetapi harus belajar seumur hidup yang senantiasa berkembang, yaitu belajar untuk hidup (Faure, 1982).

Terciptanya masyarakat belajar atau belajar untuk hidup merupakan tujuan pendidikan seumur hidup (Sutaryat Trisnamansyah, 1993). Maka wahana pembelajaran warga masyarakat dalam organisasi sosial akan lebih membantu terciptanya masyarakat belajar. Organisasi bisa digunakan sebagai wadah dan norma dalam pengembangan konsep pendidikan seumur hidup. Bagi anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, ibu-ibu, bahwa organisasi sosial itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi, sumber belajar, tempat bertanya, wadah berdialog, berkonsultasi, penampung aspirasi dan gagasan, sekaligus memberikan alternatif pemecahan masalah, peningkatan kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan tertentu bagi warga masyarakat.

Dengan demikian maka dimensi-dimensi dalam organisasi sosial itu, sebagai katalisator pendidikan luar sekolah sudah berkembang sejak lama dalam kehidupan manusia. Salah satu strategi organisasi sosial adalah pemberdayaan kelompok. Menurut Kindervatter (1979:207) karakteristik pemberdayaan (empowering) kelompok ini diasumsikan memberikan kontribusi terhadap kapabilitas pemahaman pada kondisi sosial yang ada.

Pemanfaatan organisasi sosial dianggap sebagai proses pemberdayaan menurut Kindervatter, karena memiliki potensi sebagai berikut :

- 1) adanya kelompok kecil, yang bisa disusun berdasarkan usia, kepentingan, pengembangan kelompok, sampai pada tahap pelembagaan.
- 2) Penalaran sikap tanggung jawab, inisiatif, dan peran serta anggota kelompok
- 3) Peran serta kepemimpinan dalam pengembangan keterampilan dan motivasi.
- 4) Sebagai agen, dan pemberi kemudahan belajar, dan latihan baik langsung atau tidak langsung.
- 5) Pembinaan demokratisasi dan kekeluargaan.

- 6) Pembinaan persatuan dan kesatuan serta refleksi terhadap masalah lewat pengalaman belajarnya.
- 7) Pembinaan yang menekankan pada kepercayaan diri.
- 8) Pengembangan sosialisasi ekonomi dan politik.

Karakteristik variabel seperti itu . . . dijadikan sebagai panduan studi ini dalam mendeteksi peran organisasi sosial terhadap lingkungan masyarakat setempat. Organisasi sosial yang berperan sebagai satuan pembelajaran dan pemberdayaan warga masyarakat.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Kecamatan Rancaekek merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat (Lihat peta nomor 1). Di daerah utara Kecamatan Rancaekek terutama di pinggir jalan raya dibangun pabrik-pabrik. Berbatasan dengan daerah Kabupaten Sumedang juga banyak dibangun pabrik-pabrik yang memproduksi tekstil dan barang lainnya. Kehadiran industri di daerah ini merupakan salah satu implikasi pembangunan nasional bidang ekonomi sektor industri yang menghadirkan sejumlah peluang dan kesempatan kerja dan usaha, sekaligus mengundang sejumlah persoalan sosial yang menarik untuk dikaji.

Dilema yang menyelimuti kawasan ini bila dikaji secara kritis dan empirik, maka dapat diidentifikasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya pembangunan sektor industri, bagi warga masyarakat Rancaekek merupakan suatu peluang dan kesempatan yang baik. Ditambah lagi dengan peningkatan sarana dan prasarana sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi yang ada. Namun derasnya perubahan itu akselerasinya belum dapat diimbangi dengan perkembangan kondisi sosiso budaya, dan psiko sosial masyarakatnya. Akibatnya pada sebagian orang timbul perasaan tersisih, tidak diajak berpartisipasi, kecemburuan kepada pengusaha, pemerintah, atau tenaga kerja pendatang. Terjadinya polusi udara, air dan polusi moral (tindak kriminal, kenakalan remaja, pergaulan bebas, pelecehan seksual, pelanggaran hak asasi) keseluruhannya dianggap warga masyarakat tersebut, gara-gara adanya

pabrik. Pergeseran nilai keluarga, kesetiakawanan sosial, keagamaan serta nilai material dan penghargaan nampaknya sulit diantisipasi oleh mereka, sehingga menimbulkan kerikuhan dan kebingungan.

2. Kondisi semacam ini merupakan gambaran rendahnya adaptabilitas masyarakat akibat dari rendahnya pendidikan dan keterampilan mereka. Hal ini terlihat dari kerikuhan warga masyarakat menghadapi berbagai masalah yang ada di sekitarnya. Apalagi pola kehidupan pertanian yang tradisional mengakibatkan terjadinya kemiskinan .
3. Kunci utama peningkatan adaptasi masyarakat adalah adanya pendidikan alternatif yaitu pendidikan yang lebih demokratis, terkait dan sepadan dengan lingkungannya, praktis dan murah, dekat dengan mereka, tidak terlalu terikat waktu, dan tempat dan prosedur.
4. Potensi lembaga pendidikan alternatif sebenarnya telah mereka miliki, seperti organisasi sosial yang merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Posisinya amat strategis sebagai ; sumber belajar, sumber informasi, lembaga konsultasi penampung aspirasi, wahana dialog dan tukar pengalaman, sehingga pesertanya bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang berguna bagi peningkatan sikap dan perbuatan mereka sehari-hari. Namun kondisinya belum dima'nakan sebagai wahana pembelajaran masyarakat. Kondisi organisasi sosial yang ada cenderung sarat beban karena berbagai kepentingan termasuk program pembangunan dari berbagai departemen terkait, sehingga sering terjadi tumpang tindih pada sasaran binaan yang sama. Ditambah lagi dengan tuntutan politis dan kepamrihan individu tertentu yang mewarnai organisasi itu. Akibatnya visi dan misi organisasi menjadi samar dan tidak mencapai sasaran.
5. Masyarakat yang berpola pada kehidupan pertanian tradisional sebenarnya memiliki sejumlah potensi budaya yang bisa dikembangkan secara produktif menuju pasar bebas atau internasional yang kompetitif. Akan tetapi masih ada konsep budaya yang dianggap kaku dan merupakan salah satu ciri budaya masyarakat yang mesti 'dihilangkan' dan diganti dengan budaya 'baru'.

Dengan begitu banyak masalah dari dilema sosial yang muncul, maka untuk mempertajam analisis dan memperdalam kajian studi perlu adanya fokus masalah penelitian.

C. Fokus Masalah Penelitian

Beranjak dari masalah tersebut maka fokus masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah persepsi dan respon warga masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan kehidupan di daerah dari yang bercorak agraris kepada yang berfokus industri.
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap organisasi sosial sebagai satuan pendidikan luar sekolah, mengenai keberadaan dan kesiapannya, untuk membantu menjembatani adaptasi warga masyarakat menghadapi kehidupan yang baru.
3. Sejauh manakah organisasi sosial berperan dalam membantu pembelajaran dan pemberdayaan warga masyarakat beradaptasi dari pola kehidupan lama yang bercorak agraris kepada kehidupan baru yang berintikan industri.
4. Sejauh manakah warga masyarakat memanfaatkan keberadaan dan kesiapan organisasi sosial yang ada dalam mengadaptasikan dirinya kepada kehidupan yang berintikan industri dan sejauh manakah keberhasilannya.
5. Strategi pembelajaran dan pemberdayaan apakah yang digunakan organisasi sosial dalam pembinaan warga masyarakat agar mampu mengadaptasikan diri pada kehidupan yang berfokus industri.
6. Karakteristik organisasi dan karakteristik sosio budaya masyarakat manakah yang berperan sebagai potensi pendidikan luar sekolah, baik sebagai faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam proses adaptasi ini.
7. Bagaimanakah upaya meningkatkan interaksi warga masyarakat dengan organisasi sosial sebagai wahana belajar agar terjadi proses peningkatan adaptabilitas mereka.

D. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan menemukan beberapa konsep, model pembelajaran dari organisasi sosial sebagai satuan pembelajaran dan pemberdayaan warga masyarakat yang mampu membantu mereka mengadaptasikan diri dengan perubahan sosial berkaitan dengan perubahan dari kondisi agraris pada kondisi industri. Konsep dan model-model itu diperoleh dari deskripsi temuan yang diangkat dari hasil analisis:

- a. Latar belakang keberadaan organisasi sosial yang ada di Kecamatan Rancaekek, dan perkembangannya sampai sekarang.
- b. Persepsi warga masyarakat terhadap organisasi sosial, dan kesiapan dan manfaatnya sebagai wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat bisa beradaptasi dari kehidupan agraris pada kehidupan industri
- c. Berbagai macam, bentuk dan karakteristik organisasi sosial sebagai satuan pendidikan luar sekolah yang membina warga masyarakat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya
- d. Upaya menemukan dan mengatasi masalah organisasi sosial sebagai wahana pembelajaran dan pemberdayaan warga dalam menghadapi situasi baru

2. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat mendukung atau mengoreksi konsep-konsep yang ada, khususnya konsep pendidikan luar sekolah dan konsep pendidikan pada umumnya. Konsep tersebut seperti implikasi dari konsep pendidikan sepanjang hayat pada warga masyarakat melalui peran serta mereka dalam organisasi sosial, sebagai pengalaman belajar mereka yang dapat dijadikan bekal hidup sehari-hari.

Temuan ini bisa memperkuat dan mengoreksi konsep belajar yang muncul dari atribut-atribut proses individu dalam proses pemahaman informasi, baik secara individual atau kelompok melalui kemampuan penginderaan mereka terhadap lingkungannya. Lazimnya kebiasaan belajar seseorang melalui informasi dan kemampuan penginderaan yang dilandasi oleh motivasi dan persepsinya terhadap tujuan atau pandangan hidupnya.

Komponen proses pemahaman informasi, kemampuan pengindraan, motivasi dan persepsi merupakan upaya adaptasi manusia dengan lingkungannya yang perlu pengujian lebih mendalam, baik secara individual maupun dengan kelompoknya. tentunya perbedaan pengalaman belajar itu akan menghasilkan derajat adaptasi yang berbeda pula.

Perbedaan budaya, latar belakang sosio ekonomi, politik suatu masyarakat memberikan karakteristik tertentu dalam belajar mereka, tingkat kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Karakteristik seperti ini memberikan gambaran adanya pembelajaran dan pemberdayaan yang bervariasi dalam masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap konsep dan program pendidikan luar sekolah.

Implikasi konsep pembelajaran yang bervariasi akan teruji dalam proses interaksi mereka yang secara terorganisasi dan sistematis dalam kegiatan bermacam-macam organisasi sosial yang diikutinya. Konsep pembelajaran dan pemberdayaan amat berkaitan dengan berbagai strategi, taktik, pendekatan dan teknik yang khas dalam konteks pendidikan luar sekolah, serta pengembangannya di masyarakat.

Kekhasan pendidikan luar sekolah seperti tampak dalam gambar pengembangan pendidikan anak pra sekolah, dengan model kelompok bermain, pengajian anak, asuhan anak dalam keluarga. Pengembangan pengelolaan program pembinaan remaja, pemuda, orang dewasa dan ibu-ibu. Pembinaan ini akan lebih intensif apabila mereka terikat dalam suatu organisasi atau kelompok. Pemunculan organisasi sosial di masyarakat sebagai wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat tampaknya masih sangat tergantung pada kemajuan dan perkembangan sosial, budaya, dan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Begitu juga variasi, visi, dan misi organisasi sosial yang muncul akan banyak diwarnai oleh perkembangan dan tingkat kemajuan ilmu dan teknologi yang ada, tidak terbatas pada misi keagamaan, kedaerahan, kepemudaan, usaha, kesenian, tetapi berkembang pada misi keprofesian, politik, jasa, pembinaan kreatifitas, pengembangan wawasan masa depan.

Dengan temuan konsep pembelajaran dan pemberdayaan dari berbagai visi organisasi sosial itu bukan hanya menemukan masalah, tetapi juga bisa memperkaya khazanah strategi dan pendekatan yang berguna bagi pengembangan program pendidikan

luar sekolah, khususnya dalam konteks pada masyarakat yang sedang beradaptasi dari pola kehidupan pertanian ke dalam kehidupan industri.

Dalam tilikan ilmu-ilmu sosial, temuan ini dapat memberikan kontribusi terhadap koreksi atau memperkuat konsep yang ada, yang selama ini memberikan sumbangan dasar teoritik yang amat berharga bagi pendidikan luar sekolah, seperti teori sosiologi tentang konsep organisasi sosial, sosialisasi, adaptasi sosial, lembaga sosial, pranata sosial, kelompok sosial, konsep komunitas dan masyarakat.

Dalam konteks teori antropologi budaya, khususnya menyangkut pewarisan dan penurunan nilai tradisi, norma, perilaku, kebiasaan, bahasa dan seni budaya yang banyak diangkat dalam pengembangan program pendidikan, serta berupaya mengurangi nilai budaya yang dianggap sebagai faktor penghambat pembangunan. Temuan ini bisa melihat tentang konsep baru dalam hal pendidikan sebagai terapi budaya seperti yang dilontarkan Soepardjo Adikusumo (1992).

Proses perubahan budaya yang secara evolutif terus berjalan dari pola perilaku agraris menuju pola perilaku yang berfokus industri, dapat ditelusuri dan berguna, yang bisa memberikan gambaran serta budaya yang responsif terhadap perubahan itu. Selanjutnya faktor itu dapat dimanipulasikan untuk kepentingan pengembangan masyarakat melalui pendidikan.

Kaitan dengan ilmu ekonomi, tentu saja konsep kebutuhan yang seringkali menjadi pola pengembangan program pendidikan luar sekolah. Temuan penelitian diharapkan akan memberikan masukan atau memperkaya konsep produksi dan distribusi pendapatan, bilamana individu atau kelompok masyarakat itu bisa meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam bekerja. Pendapatan seseorang atau keluarga akan meningkat bilamana dia bertindak secara efisien dan produktif, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Program pembangunan ekonomi juga akan bisa terkoreksi oleh temuan ini, dalam akselerasinya di masyarakat, seiring dengan derajat perubahan yang terjadi dalam sisi sosio budaya dan psikologis masyarakat.

Itulah sebabnya kecenderungan kekhawatiran dari sisi psikologis, yang diasumsikan perubahan atau pembangunan itu membawa 'kejutan psikologis'. Padahal justru dengan adanya industrialisasi itu akan membawa angin segar bagi segenap warga

masyarakat setempat. Temuan ini bisa menjelaskan dan membantu memperbaiki kondisi psikologis masyarakat, seperti persepsi, motivasi, dan sikap mereka terhadap keberadaan berbagai proyek pembangunan. Sudah barang tentu konsep psikologis itu akan dikembangkan secara tepat oleh para pakar bagi pengembangan program pendidikan luar sekolah yang terkait, dan sepadan dengan kebutuhan masyarakat.

Dari segi praktis hasil temuan ini, mudah-mudahan bisa membantu memberikan sumbangan konsepsional maupun operasional terhadap program pendidikan luar sekolah, khususnya yang diselenggarakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidikan Masyarakat. Begitu juga untuk pemerintah daerah setempat kecamatan dan kabupaten untuk mengoptimalkan lembaga sosial yang ada untuk mengoperasionalkan program pembangunan secara terpadu.

Ini berarti bahwa operasionalisasi program pembangunan akan baik dan berhasil apabila semakin banyak peran serta warga masyarakat. Derajat tinggi rendahnya peran serta masyarakat tergantung pada pengalaman belajar mereka dalam organisasi sosialnya. Temuan ini akan memberikan gambaran pengalaman bahwa program pembangunan di pedesaan pinggiran kota itu terjelma dalam berbagai kegiatan program melalui organisasi sosial. Itulah sebabnya temuan ini akan bisa memberikan masukan pada departemen terkait yang ada di tingkat kecamatan.

Setiap departemen melaksanakan kegiatan program pembangunan dengan menggunakan pendekatan penyuluhan, pelatihan, pembinaan, dan monitoring. Keseluruhan komponen itu merupakan implikasi dari konsep pendidikan luar sekolah yang memerlukan pengujian secara empirik. Oleh karena itu temuan studi ini sangat berfaedah untuk memberikan kontribusi turut menggulirkan program pembangunan secara cepat dan tepat di daerah, khususnya di daerah Kecamatan Rancaekek.

Manfaat yang terakhir dari kajian ini adalah mudah-mudahan memberikan stimulus bagi penelitian lanjutan, baik berkenaan dengan pendidikan luar sekolah maupun bagi peneliti studi pembangunan atau studi ilmu-ilmu sosial lainnya.

E. Beberapa Asumsi Penelitian

Studi ini dilandasi oleh beberapa asumsi penelitian yang beranjak dari beberapa teori, kemudian disusun dalam bentuk pernyataan yang sistematis dan kuat relevansinya dengan data. Pernyataan ini menurut Bogdan dan Biklen (1982:30) adalah menggunakan istilah paradigma, sebagai kumpulan yang 'longgar' tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan cara penelitian. Jadi penggunaan asumsi dalam hal ini sebagai dasar untuk memunculkan paradigma penelitian.

1. Organisasi Sosial sebagai Satuan Pendidikan Luar Sekolah

Organisasi sosial bisa didefinisikan sebagai jaringan hubungan yang terpolakan untuk menciptakan harapan bagi perilaku individu. Harapan ini diwujudkan dalam peran-peran tertentu yang harus dihasilkan (Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1995). Peran-peran orang yang ada dalam organisasi itu mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi secara fungsional ke arah tujuan tertentu.

Jaringan, harapan, peran dan saling ketergantungan merupakan suatu perangkat dalam organisasi yang digerakan secara dinamis oleh orang-orang di dalamnya. Dengan demikian maka organisasi sosial bukan hanya sebagai pola koordinasi kegiatan manusia (Shein, 1988) yang saling mempengaruhi, tetapi juga sebagai wadah kegiatan manusia untuk menyatukan tindakan agar lebih efektif.

Sudah dapat dipastikan orang-orang dalam kelompok itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sehingga terjadi proses edukasi di antara mereka. Proses interaksi yang demikian sengaja atau tidak, keduanya saling mempengaruhi dan mengandung arti pendidikan secara umum (D. Sudjana, 1983). Tentu saja keterlibatan orang dalam organisasi sosial akan lebih terarah dan efektif apabila proses komunikasi tadi terencana, terprogram, terjadwal dan lebih konkrit sumber informasi dan penerima informasi itu.

Tujuan organisasi sosial adalah membantu warga masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan bisa memecahkan masalah hidupnya. Mereka diberikan motivasi, untuk bisa mengidentifikasi dirinya, menyadari potensi yang

dimilikinya, menemukan masalah, dan kelemahan dirinya, untuk segera bangkit memecahkan masalahnya. Usaha penyesuaian diri mereka terjadi dalam kelompok diantara anggota, dengan tukar pikiran dan pengalaman sehingga terjadinya proses belajar membelajarkan, dari pimpinan organisasi pada anggotanya. Proses adaptasi bisa juga terjadi dengan lingkungan dimana organisasi itu berada, karena organisasi tergantung pada lingkungannya dalam banyak hal, maka organisasi harus menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan dalam lingkungannya agar supaya tetap hidup dan berkembang (Wexley, Yuki, 1992:17).

Proses belajar membelajarkan antara pimpinan organisasi sosial dengan anggota, atau anggota dengan anggota yang lainnya bisa merubah atau meningkatkan wawasan pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang. Perolehan hasil pembelajaran ini, mereka bawa sebagai rujukan nilai, dan pola perilaku dalam pergaulan sehari-hari. Karakteristik interaksi pembelajaran dan pemberdayaan pimpinan dan anggota, anggota dengan anggota secara instruktif, atau dialogis antar anggota, merupakan ciri interaksi edukasi dalam program pendidikan luar sekolah.

Jalur pendidikan luar sekolah merupakan suatu program pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak. (Pasal 1 PP. 73 Tahun 1971). Selanjutnya jika dilihat sisi interaksi yang terjadi dalam organisasi sosial, dan tujuan dalam program pendidikan luar sekolah, antara keduanya terdapat kesamaan dalam bentuk pengembangan potensi manusia.

Adapun tujuan pendidikan luar sekolah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971, pasal 2, adalah :

1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Dari rujukan formal peraturan ini, maka organisasi sosial diasumsikan dapat menjadi wahana pembinaan dan pengembangan jati diri seseorang, dalam aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilannya sejak dini hingga akhir hayatnya.

Aspek pengembangan jati diri seseorang diasumsikan sebagai proses peningkatan adaptasi individu melalui organisasi sosial terhadap perubahan masyarakat, walaupun disadari bahwa warga masyarakat itu sendiri senantiasa memiliki daya suai (Tilaar : 1992) yang kuat terhadap perubahan yang terjadi. Potensi keberadaan organisasi ini dianggap sebagai perangsang, dan wahana mempercepat daya adaptasi warga masyarakat terhadap akselerasi perubahan sosial itu.

Meningkatkan adaptasi masyarakat terhadap akselerasi perubahan menurut Freire (1984) tersingkir dari kebudayaan diam, masa bodoh, menerima saja keadaan yang diderita, tertekan dan fatal. Maka warga dengan berkelompok dan berorganisasi diasumsikan dapat membantu membebaskan manusia dari kehidupan maya yang penuh dengan khayalan, dan mimpi. Masyarakat demikian menurut UNESCO (1972) sering mempunyai dan menyatakan ciri-ciri yang muluk, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang memadai untuk menggunakan sumber belajar yang ada, serta potensi alam sekitar untuk mewujudkan cita-citanya.

Masyarakat yang demikian, perlu dijadikan sasaran program pendidikan luar sekolah, khususnya merangsang mereka untuk gemar membaca. Membaca bukan hanya bisa membaca dalam arti sempit, tetapi lebih diartikan secara luas, melihat, memahami, menilai, merefleksi, serta mampu merespon kondisi lingkungan sekitarnya. Jika masyarakat sudah berada pada tingkat masyarakat gemar membaca, menurut UNESCO keadaan tersebut telah lepas dari keadaan tingkat terbawah, dan sekaligus mengantarkan pada masyarakat gemar belajar (*learning society*). Demikian pentingnya hubungan antara kegemaran membaca dengan kemajuan masyarakat, maka sementara orang menyimpulkan bahwa kegemaran membaca itu menjadi syarat utama pada masyarakat yang gemar belajar (Santoso S. Hamijoyo, 1982).

Masyarakat yang gemar belajar ini dalam perkembangannya ditandai dengan ciri-ciri tersendiri, seperti gemar membaca, gemar mendengarkan, gemar menulis. Gemar mendengarkan menunjukkan dinamika masyarakat dalam mencari dan menseleksi

informasi yang bermanfaat. Demikian juga tingkat yang lebih tinggi masyarakat yang gemar membaca, dan menulis yang menunjukkan ikhtiar mereka untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya lebih aktif lagi.

Upaya untuk mendorong dan merangsang masyarakat ke arah budaya membaca agar tercipta masyarakat belajar, di Indonesia telah banyak dilakukan melalui berbagai program pendidikan luar sekolah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk dan jenis yang bermacam-macam, tergantung pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program tersebut umumnya terorganisasi dalam suatu wadah dalam masyarakat. Lazimnya organisasi tersebut ada yang berakar dari misi keagamaan, kepemudaan, kesenian, usaha, dan sosial lainnya.

Mereka mengusahakan salah satu jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya, seperti pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan (PP. 73 tahun 1991, pasal 5). Organisasi yang telah melembaga di kalangan masyarakat salah satunya adalah lembaga pengajian yang telah mampu membina warga masyarakat, dalam moral, nilai dan bisa menelorkan pemimpin masyarakat yang tangguh. Organisasi yang bernafas keagamaan ini cukup kuat hingga sekarang dan kredibilitasnya masih diandalkan sebagai pembina nilai-nilai ketakwaan yang sulit diganti dengan lembaga lain di masyarakat.

Pembinaan kepemudaan melalui organisasi pemuda yang berbasis dari remaja masjid, karang taruna dan berdomisili di masjid jami di RT/RW setempat. Mereka mengembangkan dirinya bersama organisasi Dewan Keluarga Masjid sebagai pembina. Begitu juga para remaja membina adik-adik kecil yang tergabung dalam taman pendidikan Al-Qur'an dan taman kanak-kanak Al-Qur'an (TPA, TKA).

Lebih dari itu organisasi keagamaan yang secara edukatif lebih maju adalah pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang telah mapan, seperti lembaga persekolahan dan telah menunjukkan kontribusinya terhadap perubahan sosial sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia. Organisasi keagamaan yang lebih bersifat politis, dan berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, telah menunjukkan sumbangannya terhadap pembinaan kader dan perjuangannya terhadap Indonesia merdeka.

Wadah pembinaan kader kepemudaan yang dipelopori pemerintah sebagai wahana aspirasi pemuda, yang keikutsertaannya dalam pembangunan dikoordinir oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI sebagai organisasi induk organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. selama ini telah banyak di berbagai organisasi kepemudaan, dalam masyarakat seperti: AMPI, FKPPI, Pemuda Muhammadiyah, IPPNU, AMS, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, Pemuda Kosgoro, Pemuda Anshor.

Disamping organisasi kepemudaan yang sangat berperan dan mengakar dalam kehidupan, juga kelompok ibu-ibu dalam organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kelompok usaha yang terkoordinasi dalam Koperasi Unit Desa, serta organisasi profesi, seperti PGRI, Kelompok pendengar dan pemirsa (Kelompencapir) yang mewarnai terhadap kreatifitas warga masyarakat terhadap pembangunan.

2. Adaptasi Sebagai Proses Pembelajaran

Anggapan utama yang melandasi konsep adaptabilitas adalah bahwa manusia pada hakekatnya merupakan makhluk hidup yang progresif secara evolusioner, dengan indikasi utama bisa memanfaatkan umpan balik lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai organisme hidup tidak secara otomatis bisa hidup bersama dengan lingkungan sekitar secara alamiah seperti makhluk lainnya.

Perilaku manusia selalu didasari oleh landasan pikiran dan tujuan. Tujuan merupakan titik sentral yang akan dituju dan mengandung pikiran peluang dan kemungkinan, dalam perilaku manusia tujuan itu dirangsang oleh stimulus lingkungan sekitar. Stimulus itu merupakan input yang akan ditransformasikan menjadi tindakan tertentu yang bertujuan.

Para biolog mengartikan tingkah laku yang bertujuan itu dari konsep umum yang disebut adaptasi. Konsep adaptasi berarti sebuah relasi yang tidak simetris (Zaleznik dan Moment, 1964). Dalam proses organisme itu terdapat polaritas antara dua kekuatan, ke arah konservasi dan mempertahankan identitas di satu pihak, serta kekuatan ke arah perubahan, adaptasi, pertumbuhan, dan perkembangan di lain pihak. Kedua kekuatan itu terus bersaing, individu tak akan pernah tetap selamanya bagaimanapun efektifnya dia mempertahankan diri.

Formulasi adaptasi terus berlangsung, dari adaptasi biologis hingga adaptasi moral dan mental, lengkap sesuai dengan tujuan dan kebutuhan manusia. Sebagaimana sudah diketahui bahwa kebudayaan merupakan produk dari adaptasi yang telah dilakukan manusia dalam masyarakat (Zaltman, 1972 : 10). Kondisi dunia sekarang ditandai dengan ketergantungan yang semakin meningkat antar organisasi, masyarakat, ekonomi, dan ekologi (Mesarovic dan Pastel, 1974, Toffler, 1975).

Dengan demikian maka manusia adalah makhluk yang memiliki sifat penyesuaian diri, organisme hidup yang adaptif, self-regulation, dan proses koordinatif yang diarahkan untuk mempertahankan diri. Hal ini dianggap manusia bertindak hanya untuk menciptakan keseimbangan dengan lingkungan sekitar, tetapi juga ada unsur pilihan, adanya kekuatan kebebasan untuk memilih.

Dalam konteks pendidikan pemahaman konsep adaptabilitas, mengandung makna peningkatan potensi individu, belajar dari lingkungan. Adaptabilitas pada intinya merupakan kemampuan untuk mengindra atau mempersepsi masalah yang terdapat di lingkungan sekitar dan menyesuaikan diri secara fleksibel dengan perubahan tuntutan lingkungan (Krech dkk, 1962). Penyesuaian secara fleksibel beranggapan bahwa seseorang tidak merasa terpaksa, resah atau rihuk menghadapi kondisi baru itu.

Rihuk menghadapi situasi baru disebabkan seseorang dihadapkan pada persoalan lingkungan, dan manfaat sumber yang terbatas untuk kepentingan sistem. Sistem dalam tuntutan biologis atau penyesuaian budaya terhadap kondisi yang diciptakan atau terhadap perubahan itu (Soerjono Soekamto, 1983). Sebab setiap perubahan mengandung guncangan-guncangan psikologis atau kejutan-kejutan (Toffler, 1975) yang senantiasa manusia berusaha menghilangkan ketegangan itu. Upaya menghilangkan ketegangan sosial dan perasaan tingkah laku yang tidak tepat dalam menciptakan harmoni lingkungan merupakan konsep adaptasi.

Jadi sebenarnya adaptabilitas memiliki dimensi yang dalam dan luas, bersifat kreatif dan selektif. Bersifat kreatif karena manusia bisa mengembangkan kemampuannya, potensinya untuk menentukan sendiri apa yang akan berubah, mempertahankan diri, maju untuk kesempurnaan dan mencegah kemunduran. Bersifat selektif, karena seseorang

memiliki kemampuan untuk memilih dan menjangkau nilai-nilai baru yang dapat diinternalisasikan ke dalam perilakunya.

Pemunculan lembaga pendidikan luar sekolah dalam masyarakat merupakan hal yang penting untuk menyuburkan potensi adaptasi itu. Itulah sebabnya kemampuan adaptasi akan tumbuh lebih kreatif bilamana adanya stimulus yang berarti dari dalam dirinya atau dari luar. Kemampuan adaptasi yang tinggi ditandai dengan sejumlah indikasi keterampilan seseorang dalam menghadapi situasi yang baru. Indikator-indikator adaptasi seseorang meliputi kemampuan : (1) pengindraan suatu masalah; (2) identifikasi alternatif pemecahan; dan (3) pembuatan beberapa kesimpulan atau keputusan. Indikator ini lazimnya dimiliki oleh setiap orang (Gilmore, 1974:142). Kunci utama menurut Gilmore derajat kecepatan dan keterampilan seseorang itu tergantung pada pengalaman belajarnya, sehingga muncul kecermatan, kemahiran pengindraan masalah, mempersepsi situasi lingkungan lebih realistis dan prospektif.

Dengan demikian kontribusi organisasi sosial sebagai wahana pembelajaran dan pemberdayaan warga masyarakat akan lebih membantu adaptasi mereka, seperti memandu menseleksi informasi, menilai dan mengorganisasikannya secara runtun, serta memecahkan masalah dengan lebih bijak dan terampil.

3. Perubahan Masyarakat dari Kehidupan yang Berpola Agraris ke dalam Kehidupan Industri, serta Modernisasi Masyarakat

Hakekatnya masyarakat itu selalu berubah, cepat atau lambat, tergantung pada faktor-faktor yang mendorong perubahan itu. Pada intinya terletak pada manusia itu sendiri yang tidak pernah puas dengan kondisi tertentu, dia selalu dinamik. Manusia sebagai faktor penggerak dalam merubah lingkungan, fisik alami, sosial dan budayanya, dengan inovasi yang merupakan hasil olah pikirnya bisa merubah pada mikro individual sampai pada level makro sistem sosial. Bisa juga perubahan sosial terjadi yang sengaja diintrodukir dari luar ke dalam masyarakat itu sendiri sehingga terjadi proses perbauran antara nilai yang ada dengan nilai-nilai yang baru.

Apalagi dengan arus informasi yang begitu cepat dan derasnya melanda masyarakat, maka perubahan itu telah dianggap sebagai suatu kebiasaan (Judistira K.

Garna, 1992:2). Makin majunya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi antara kota dan desa, daerah satu dengan daerah lainnya, negara dan kawasan di satu bagian dunia akan berpengaruh terhadap daerah, negara dan kawasan lain.

Tidak heran jika August Comte memandang suatu masyarakat itu sebagai suatu proses evolusi dan perkembangan (Etzioni, 1973:3). Secara mikro individual proses perubahan terjadi pada tahap adopsi, yang mencerminkan sebagai peristiwa mental yang selektif dan diskriminatif. Bermula dari titik kesadaran yang berdasarkan pada kebebasan memilih, apakah tradisi sebagai fakta kehidupan yang dahulu dijunjung tinggi untuk selanjutnya boleh ditinggalkan atau tidak oleh seseorang (Berger, 1982 : 173).

Arah dan sasaran perubahan sosial seringkali tumpang tindih dengan modernitas, karena keduanya sulit dipisahkan yang bermuara pada aspek perubahan yang menuju perbaikan hidup manusia dengan lingkungannya, seperti anggapan Huntington (1968) dan Tipps (1975 :201). Modernisasi dipandang sebagai suatu tipe perubahan sosial yang bukan saja menghasilkan dampak tertentu, tetapi terjadi keadaan perubahan maju berantai dengan akibat-akibatnya yang luas. Karena itu berbagai aspek, maksudnya cenderung menyatakan terjadinya transformasi pada suatu lembaga akan menyebabkan terjadinya transformasi pada lembaga yang lain.

Para ekonom memahami perubahan ekonomi akibat modernisasi teknologi, dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal untuk peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Sosiolog dan antropolog menekankan pada proses difusi dan diferensiasi yang menandai ciri modern, demikian juga ahli politik lebih menekankan pada analisisnya pada pembangunan pemerintah suatu negara. Perubahan itu menurut para politisi bisa memaksimalkan usaha pemerintah yang berawal dari usaha mengatasi konflik sosial, dan kemudian memusatkan perhatian untuk membina peningkatan kemampuan mereka guna mengadakan pembaharuan dan menyesuaikan diri dengan perubahan (Weiner, 1977 : Xiii).

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia sebagai akibat proses pembangunan nasional, yang menekankan pada bidang ekonomi dengan anggapan bahwa bidang lainnya seiring maju dan berkembang. Sektor industri menjadi cukup menonjol yang banyak menyita perhatian masyarakat, karena industrialisasi secara historis merupakan masa

kondisi ekonomi yang banyak menguntungkan ekonomi nasional. Banyak negara di dunia, yang menunjukkan kemajuan bangsanya ditandai dengan majunya industri di negara itu. Seperti istilah yang sering muncul 'Negara Industri maju', di Asia dikenal NIC (New Industrial Countries) seperti Jepang, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan atau sebutan orang Barat lima negara 'Macan' Asia.

Berbeda dengan negara industri, yaitu negara agraris yang menjadi sumber utama sebagian besar penduduk dari bidang pertanian. Ciri masyarakatnya terbelakang, kurang maju, atau sedang berkembang, tradisional, pendapatan perkapitanya masih rendah, jumlah penduduknya yang banyak, rendahnya pendidikan dan kesehatan. Rendahnya produktivitas pada masyarakat agraris dibandingkan dengan masyarakat industri, sehingga seluruh anggota negara berusaha memacu kondisi masyarakatnya ke arah masyarakat yang berfokus pada industri.

Namun perubahan dari kondisi agraris yang subsistem ke arah industri yang modern, transformasinya tidaklah secara otomatis akan menjamin keberhasilan pembangunan di Indonesia (B.J. Habibie, 1995 : 11). Itulah sebabnya proses industrialisasi agar berjalan secara efektif tanpa mengorbankan pembangunan lainnya, menurut Habibie (1995 : 11) perlu mempertimbangkan minimal empat hal yaitu :

- (1) Dilakukan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia, dan didukung oleh teknologi yang semakin meningkat,
 - (2) Dikembangkan seiring dengan pola pengembangan potensi wilayah secara merata diseluruh tanah air,
 - (3) Diselaraskan dengan nilai budaya dan tingkat perkembangan masyarakat, dan
 - (4) Dalam upaya mengolah dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui proses industrialisasi, harus diperhatikan sisi keserasian dan keterkaitannya dengan kelestarian lingkungan demi kesinambungan pembangunan nasional.
- (B.J.Habibie, 1995:11).

Inti ungkapan itu... menunjukkan bahwa industrialisasi bermakna, yang merujuk pada hakekat pembangunan nasional itu pada pembangunan sumber daya manusia secara optimal. Manusia yang berkualitas, mampu menguasai teknologi sebagai alat peningkatan

pemerataan dan keseimbangan pembangunan sehingga industrialisasi dianggap sebagai motor modernisasi masyarakat, yang bisa menciptakan keserasian dan kesinambungan pembangunan nasional.

Keseimbangan dan keselarasan dalam pembangunan merupakan sesuatu hal yang dilematik. Munculnya dilema ketidakserasian antara akselerasi pembangunan fisik dan budaya yang tidak selamanya sinkron. Pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kebutuhan materi, fisik, kadang-kadang tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran moral, etika, norma sosial. Pembangunan bidang non materi yang menyangkut pengembangan sosial psikologis, termasuk pendidikan amatlah sulit. Kesulitannya berkenaan dengan proses perubahan pada diri manusia dan masyarakat yang unik dalam pendeteksiannya.

Disamping memerlukan waktu perubahan pada diri manusia dalam masyarakat, juga indikator yang muncul seringkali kurang menggambarkan perubahan yang sebenarnya. Maka pembangunan masyarakat dilihat dari sisi politik, pendidikan, sosiologis, umumnya diukur seberapa besar lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu bisa memberikan kontribusi terhadap warganya? Apakah lembaga itu dapat bermanfaat sebagai wahana penampung, penyalur, penguat aspirasi warga yang efektif di masyarakat? (Weiner, 1975 : xxi).

Wahana pembelajaran dan pemberdayaan di masyarakat Indonesia cukup potensial untuk dikembangkan pada masyarakat modern, tetapi keberadaan organisasi sosial masih belum disadari sebagai suatu potensi yang dominan secara edukatif. Seperti lembaga pengajian di masyarakat atau lembaga usaha yang mampu menciptakan kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Itulah sebabnya perubahan ke arah modernisasi secara aplikatif membutuhkan peranserta berbagai pihak dari pemerintah dan kalangan warga masyarakat. Dapat dipastikan lembaga pendidikan, organisasi sosial, lebih banyak dibebani tanggung jawabnya untuk membantu warga masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi yang terus berkembang.

Kehadiran program pendidikan luar sekolah dituntut selalu tampil, karena sifat dan karakternya yang fleksibel dengan kondisi lapangan. Pelaksanaan program pendidikan luar sekolah melibatkan masyarakat setempat secara demokratis, bisa memanfaatkan lembaga

keagamaan, usaha, pemuda, profesi, melalui berbagai pendekatan sesuai dengan misinya. Upaya ini sekaligus mengangkat jati diri masyarakat yang berasal dari akar kehidupan mereka dan membina meningkatkan dalam memperoleh informasi. Susana yang demikian merupakan suatu kondisi masyarakat yang kondusif untuk terciptanya masyarakat belajar atau masyarakat modern.

F. Paradigma Penelitian

Pengkajian tentang peran organisasi sosial sebagai satuan pendidikan luar sekolah terhadap warga masyarakat akan terjadi apabila organisasi sosial itu sendiri diasumsikan sebagai satuan belajar membelajarkan yang terkoordinir antar warga masyarakat. Lebih menarik lagi apabila organisasi sosial itu dianggap perannya di masyarakat sebagai wahana pembelajaran dan pemberdayaan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

Paradigma dalam penelitian ini bisa terlihat dari rumusan berikut:

1. Keberadaan organisasi sosial akan muncul perannya di masyarakat apabila visi, misi, tujuan, nilai organisasi itu terefleksikan dalam kehidupan warga masyarakat. Kesimpulan yang dapat memuaskan apabila ditinjau dari faktor eksternal maupun internal dari organisasi.
2. Organisasi sosial merupakan satuan pendidikan luar sekolah karena di dalamnya terdapat beberapa komponen program pendidikan, dan interaksi edukasi yang secara sistemik bertujuan pada sasaran khalayak tertentu. Keberhasilan program pendidikan yang diluncurkan pada masyarakat akan banyak ditentukan oleh beberapa resistensi internal berdasarkan mental warga masyarakat itu sendiri, dan resistensi eksternal yang berakar pada kesiapan kondisi sosio budaya masyarakat menyambut program itu.
3. Program pendidikan luar sekolah yang dianggap sebagai wahana membantu adaptasi masyarakat, menjadi pembebas hambatan, kerikuhan internal dalam diri individu, dan juga hambatan eksternal yang terdapat dalam tatanan sosial. Pengembangan program pendidikan luar sekolah terhadap perubahan sosial tidak bergulir dalam proses yang otomatis mekanis, tetapi pada gilirannya dipengaruhi oleh kesiapan belajar individu dan

kemampuannya untuk menerima sejumlah spektrum informasi atas dasar persepsi yang bersifat selektif.

4. Hakekat penerimaan hal yang baru bukan hanya karena individu atau khalayak warga masyarakat memiliki otonomi untuk menangkis, membedakan dan memilih alternatif secara kreatif, tetapi makna yang dapat diinternalisasi warga masyarakat juga dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap makna beberapa masalah pokok dalam hidupnya. Pandangan masyarakat umumnya berakar pada sistem nilai budaya, nilai agama, serta ritus dan diaktualisasikan pada berbagai usaha. Aktualisasi pandangan ini bukan hanya berwujud dalam perilaku, tetapi juga berupa mekanisme untuk memecahkan masalah sehari-hari.
5. Persoalan sistem nilai budaya yang secara mapan dianggap suatu kemestian yang mengikat, namun hal ini juga terbuka berpotensi untuk berubah. Diantaranya karena stimulus yang bersumber dari program pendidikan luar sekolah atau keterlibatan yang mendalam warga masyarakat di dalam organisasi sosial yang ada di lingkungannya.
6. Keterlibatan yang mendalam pada organisasi sosial akan menumpuk komitmen emosional yang kuat, dan meningkatkan intensitas komunikasi secara interpersonal dengan nara sumber, sebagai pemimpin formal atau informal dalam pembangunan di pedesaan, sehingga membina sikap terbuka terhadap hal-hal yang baru dan relevan dengan peningkatan kemampuan warga..
7. Efektifitas program pendidikan luar sekolah bukan saja dipengaruhi oleh kesiapan warga masyarakat untuk menerimanya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi daerah yang berbeda-beda.
8. Adaptabilitas warga masyarakat terhadap hal yang baru, merupakan akumulasi dari berbagai kemampuan pokok yang memungkinkan orang untuk menginternalisasi dan mengekspresi gagasan yang lebih abstrak. Kemudian meningkat pada tahap yang lebih tinggi yakni kemampuan memahami dan menghayati sampai pada peningkatan keterampilan berkomunikasi dengan lingkungan sosial atau budaya yang lebih terbuka dan dinamis.
9. Perilaku adaptif akan tumbuh subur apabila didukung oleh nilai budaya rasional produktif, dalam organisasi sosial yang lebih maju untuk menyokong peningkatan

ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu perilaku adaptif itu bukanlah hal yang mekanistik tetapi lebih bersifat inovatif.

10. Industrialisasi merupakan program pembangunan di Indonesia yang pada hakekatnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Industri akan terwujud apabila ada sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu dan teknologi.
11. Industrialisasi mampu menciptakan kesempatan kerja, peluang usaha bagi sektor lainnya disamping mampu memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan dalam negeri serta ekspor
12. Industrialisasi mengandung arti penting bagi sektor pertanian, yakni terciptanya mekanisasi pertanian, deferensiasi, atau adanya agro bisnis di pedesaan. Asumsi ini akan bisa mengurangi arus urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota dan sekaligus bisa menciptakan pola pembangunan nasional yang berimbang. Perimbangan sektor pertanian dan industri demikian juga antara pembangunan di perkotaan dan pedesaan.

Paradigma secara keseluruhan dapat digambarkan : pada bagan 1(halman 40).

Dari gambar ini diprediksikan organisasi sosial bisa menjembatani warga masyarakat dari kondisi agraris ke fokus industri sebagai peran serta dalam pembangunan. Lembaga ini sebagai wahana implementasi program pemerintah yang dikembangkan oleh berbagai departemen di pedesaan. Keberadaan lembaga sosial muncul dari akar keagamaan, kepemudaan, ibu-ibu, kelompok usaha, kesehatan, profesi, dsb.

Oleh karena itu peran organisasi sosial sudah dipastikan amat determinan bagi warganya untuk bisa mengantarkan adaptasi mereka dari kondisi agraris menuju fokus industri, walaupun diakui setiap masyarakat memiliki resistensi tertentu yang harus diperhitungkan. Itulah sebabnya adaptabilitas masyarakat membutuhkan proses interaksi dan internalisasi semua warga bersama para aparat terkait, sehingga permasalahan ke arah kondisi yang berfokus industrialis bisa diatasi.

BAGAN 1.
PARADIGMA PERAN ORGANISASI SOSIAL TERHADAP ADAPTABILITAS MASYARAKAT
KONDISI AGRARIS PADA KONDISI INDUSTRI

